

DARTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Hasan Basri Rina Suryanti (2023) Hukum Acara Perdata

Kette Soleman, 2023, “*Buku Ajar Hukum Acara Perdata*” kupang

Kitab KUHPerdata

Riduan Syahrani, 2004 *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,).

Yulia, 2018 *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi.

Yahya Harahap, 2005 *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan,*

Sumber Jurnal

Amri Panahatan Sihotang¹, Gita Novita Sari², Zaenal Arifin³, Muhammad Isro Wahyudin⁴ (2023) Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi *Jurnal USM Law*

Adelia, A., & Wahyuni, R. (2024). Keabsahan perjanjian jual beli tanah dari objek tanah warisan yang belum dibagi berdasarkan kuhperdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 691-698.

Dina Catur Ayu Ningtyas (hak atas tanah sebagai dasar pembuktian bagi Pemiliknya dalam hukum agraria yang di dasari uupa. *Jurnal Penelitian Hukum* hln 30.

Henry Aspan, Erniyanti, Etty Sri Wahyuni. 2023 *jurnal perjanjian nominee dalam praktik jual beli tanah* hlm 4045.

I Gusti Bagus Yoga Prawira (2016) tanggung jawab ppat terhadap akta jual beli tanah. *jurnal kajian hukum dan keadilan*

Indah Sari (2017) hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di indonesia menurut undang-undang pokok agraria UUPA. *jurna lmitra manajemen* halaman 28

Maharani, I. A. D., Puspadma, I. N. A., & Astiti, N. G. K. S. (2023). Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah yang Dilakukan tanpa Akta PPAT Ditinjau dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 261-267.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 115-125.

Undang –undang

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-undang Hukum Acara Perdata
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Putusan Pengadilan

1. 1/Pdt.G/2025/PN Sdn
2. Nomor 63/PDT/2025/PT TJK
3. Nomor 6384 K/Pdt/2025